

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan mengenai pemikiran politik Ibnu Khaldun dan Nurcholish Madjid dalam etika perpolitikan yaitu tertuang dalam poin-poin berikut:

1. Etika politik menurut pemikiran Nurcholis Madjid yaitu kehidupan politik tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kehidupan politik pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bias lepas dari tuntutan moral yang tinggi. Berpolitik harusnya berstandar akhlak mulia yang sekarang dikenal sebagai etika politik. Pesan-pesan etika politik menurut Nurcholish Madjid tercakup dalam beberapa pokok pikiran. *Pertama*, demokrasi merupakan suatu system yang membuka kemungkinan eksperimental terus menerus dalam kerangka dinamika pengawas dan pengimbangan (*check and balance*) masyarakat. Pemikiran tentang demokrasi meliputi oposisi, prinsip musyawarah, pluralisme, dan kedaulatan rakyat. *Kedua*, keadilan sosial merupakan tujuan sebenarnya dalam bernegara, sebab dengan adanya keadilan sosial akan tumbuh rasa ikut punya dan rasa ikut serta oleh semua.
2. Corak pemikiran Etika politik Ibnu Khaldun adalah lebih detail baik dari mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang urusan duniawi, terlihat dari pembahasannya pada pembahasan sebuah Negara, serta sampai menekankan bahwa yang harus dipimpin oleh seorang wakil Allah atau yang disebut khalifah. Urusan duniawi yang dimaksud dari pemikiran etika politik tersebut menekankan pada keseimbangan urusan dunia dan akhirat
3. Relevansi dari pemikiran Nurcholish Madjid dan Ibnu Khaldun tentang etika politik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kekinian, sangat cocok apabila diterapkan masa sekarang. Yang dikemas dalam prinsip ideology, keadilan, keterbukaan, kebersamaan. Oleh karena itu, aktualisasi etika politik bagi elit politik maupun masyarakat Indonesia

harus diwujudkan, demi kemajuan dan kesejahteraan negara dan bangsa kita ini.

B. Saran

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholish Madjid telah menuai hasil baik dari segi persamaan, perbedaan dan relevansinya. pada akhirnya dari semua pembahsana diatas itu, sebenarnya bagaimana upaya untuk mewujudkan tatanan politik yang dicita-citakan.

Para pelaku politik harus memperlihatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam konteks etika berpolitik Islam.

Pertama, bagian para kaum akademis mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti, dan para birokrat anggaplah hasil dari penelitian ini merupakan wacana untuk bias meluaskan lagi perbincangan metodologis pustaka dalam konsep studi islam yang terkait dalam etika berpolitik.

Kedua, dari hasil penelitian ini, setidaknya juga memiliki kelayakan untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan mengkaji objek penelitian yang sama dengan penilitan ini, dengan metode dan pendekatan yang berbeda.

Ketiga, bagi siapapun yang terlibat dalam kencana permainan politik praktis, maka setidaknya pemikiran Ibnu Khaldun ini dapat dijadikan sebagai referensi etis dalam berperilaku maupun membangun sebuah system nilai Islam, guna mencapai sebuah masyarakat dan Negara yang adil dan terbuka.

Apabila dalam penelitian skripsi ini masih ada hal-hal yang masih kurang dari segi bahan dan sumber, kritik dan saran diharapkan lebih menyempurnakan skripsi ini.